



**LAPORAN BADAN LEGISLASI
ATAS
EVALUASI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2023
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Tanggal 29 Agustus 2023

=====

**Disampaikan oleh: Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
Wakil Ketua Badan Legislasi, A-472**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat waláfiat.

Selanjutnya perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Legislasi bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD RI.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang menyebutkan bahwa evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan sewaktu-

waktu. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) menyebutkan dalam hal disepakati adanya perubahan Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan berdasarkan evaluasi, perubahan Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan.

Terhadap pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, perlu kami sampaikan bahwa dari 39 RUU Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, 25 (dua puluh lima) RUU disiapkan oleh DPR, 11 (sebelas) RUU disiapkan oleh Pemerintah, dan 3 (tiga) RUU disiapkan oleh DPD, dapat kami sampaikan perkembangannya sebagai berikut:

- a. 13 (tiga belas) RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang, 10 (sepuluh) diantaranya merupakan RUU Kumulatif Terbuka;
- b. 16 (enam belas) RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, 5 (lima) diantaranya merupakan RUU Kumulatif Terbuka;
- c. 6 (enam) RUU akan memasuki Pembicaraan Tingkat I;
- d. 29 (dua puluh sembilan) RUU selesai Harmonisasi (28 merupakan RUU Kumulatif Terbuka);
- e. 3 (tiga) RUU dalam proses Harmonisasi (1 merupakan RUU Kumulatif Terbuka); dan
- f. 17 (tujuh belas) RUU dalam proses penyusunan di DPR dan Pemerintah.

Memperhatikan capaian tersebut dan mengingat kebutuhan hukum dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Badan Legislasi bersama dengan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta PPUU DPD RI dalam rangka evaluasi Program Legislasi Nasional Tahun 2023, menyepakati untuk menarik 9 (Sembilan) Rancangan Undang-Undang dari Prolegnas RUU Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (*sudah masuk Prioritas 2023*);
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; dan
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan.

Selanjutnya, Rapat Kerja Badan Legislasi Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD RI juga menyepakati untuk:

1. menambah 4 (empat) RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, yaitu RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (usulan Pemerintah), RUU tentang Penilai (usulan Pemerintah), RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (usulan Pemerintah), dan RUU tentang Permuseuman (usulan DPR/Baleg).
2. Memasukan 3 (tiga) RUU dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024, yaitu RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (usulan Pemerintah), RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional (usulan Pemerintah), dan RUU tentang Permuseuman (usulan DPR/Baleg).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional Tahun 2023 tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 menjadi 42 RUU (26 RUU diusulkan DPR, 13 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 3 RUU diusulkan DPD RI) serta Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020-2024 menjadi 253 RUU yang sebelumnya 259 RUU. ***(Adapun daftar RUU terlampir dalam laporan)***

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional Tahun 2023 untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan Prolegnas.

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinilah kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi, Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan evaluasi Program Legislasi Nasional Tahun 2023 ini dalam suasana yang penuh demokratis. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi, Staf Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Tim Ahli/Pendukung yang telah memberikan dukungan secara maksimal.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 29 Agustus 2023
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA

ttd

DR. H. ACH. BAIDOWI, S. SOS., M.SI

A-472